

# MENGEJAR BAYANGAN: PERLAWANAN SEMU BURUH PANEN DALAM MELAWAN HEGEMONI ALAT PANEN MILIK TUAN TANAH

Oleh:  
Yogaprasta Adi Nugraha

*“Sekarang yang jadi buruh panen dan operator mesin perontok padi sudah **binasah**, mereka sudah digantikan dengan mobil-mobil panen yang besar” Ibu SB (40 thn, mantan buruh panen)*

Teknologi pertanian dari satu sisi dapat dilihat sebagai sebuah anugerah yang dapat meningkatkan produksi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Combine Harvester (kemudian akan disingkat CH) sudah 4 tahun terakhir diperkenalkan sebagai salah satu strategi meningkatkan produksi. CH merupakan alat pemotong padi yang mampu secara cepat memanen padi di sawah. Namun, di satu sisi kemunculan CH menimbulkan permasalahan tersendiri. Keberadaan mobil panen ini mengancam eksistensi buruh panen yang sudah lama menjadikan kegiatan panen sebagai salah satu strategi bertahan hidup musiman mereka. Sebelum kehadiran CH, dalam satu hektar dapat menyerap tenaga kerja sekitar 30 orang (laki – laki dan perempuan) sehingga lebih terjadi distribusi pendapatan secara lebih adil. Paska kemunculan CH, tenaga panen yang terserap maksimum hanya 7 – 8 orang (laki – laki saja). Dalam kondisi yang “normal” harusnya para buruh panen yang kehilangan pekerjaannya melakukan perlawanan terhadap keberadaan CH karena kehilangan sumber pendapatan, namun pada kenyataannya tidak ada yang perlawanan buruh karena pemilik CH adalah tuan tanah kaya desa yang memiliki sawah puluhan hektar dan digarapkan kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Ketidakterdayaan, Buruh Panen, Teknologi Pertanian, Tuan tanah*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latarbelakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara agraris yang membasiskan pendapatan negaranya kepada sektor pertanian, terutama sektor tanaman pangan. Namun, saat ini keberadaan Indonesia sebagai Negara agraris sedang dalam posisi dipertaruhkan. Hal ini terlihat dari impor bahan pangan (terutama beras), sebagai sebuah bangsa yang pernah mengalami kejayaan masa pertanian dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 – 1985, kondisi ini tidak dapat dilihat sepele. Bangsa yang memiliki tradisi ekspor bahan pangan memandang impor beras sebagai sebuah legimitasi ketidakefektifan dalam mengelola sumberdaya alam terutama sawah. Saat ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai *real estate*, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan. Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun, sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu ha/tahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru. Konversi lahan sawah sekitar 80 persen terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa.

Kondisi yang telah disebutkan di atas membuat pembangunan pertanian tanaman pangan menjadi sangat sulit. Secara logis, hal ini berdampak terhadap meningkatnya angka import padi Indonesia. Tugas ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh

Kementerian Pertanian. Berdasarkan isu ini, Kementerian Pertanian mencanangkan pentingnya untuk menggenjot angka produksi melalui introduksi mekanisasi pertanian. Rasional lain di balik pengenalan teknologi pertanian ini adalah semakin berkurangnya tenaga kerja pertanian, kondisi ini dilihat sebagai suatu ancaman bagi peningkatan produksi Indonesia. Teknologi yang diperkenalkan adalah *Combine Harvester (Selanjutnya disebut CH)*. Fungsi utama dari CH lebih kepada peningkatan produksi, efisiensi kerja, kualitas dan daya saing produk serta dapat menekan *losses* dan mengurangi ongkos produksi. Untuk itu, Pemerintah banyak memberikan bantuan teknologi pertanian salah satunya adalah mesin *combine harvester*.

CH ini merupakan alat panen padi dengan teknologi panen yang paling mutakhir. CH tersebut dapat bekerja pada areal sawah yang luas dan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat karena CH dilengkapi dengan alat pemotong, perontok dan mengarungkan padi dalam suatu proses kerja saja (Hisbuan, 1999). Dukungan pemerintah terhadap CH sangat terlihat, hal ini terlihat dari alokasi anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk memfasilitasi bantuan sarana paskapanen kepada gapoktan/poktan. CH ini bertujuan untuk menurunkan susut hasil komoditas padi, menjaga agar kualitas hasil, memperpanjang masa simpan. Kebijakan pengembangan penanganan paskapanen difokuskan agar sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan 2010 – 2014.

Sebagai sebuah inovasi, CH dituntut untuk memiliki keunggulan relatif dibandingkan dengan teknologi sebelumnya (*Power Thresher*). CH memiliki beberapa keunggulan relatif jika dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, antara lain: (1) Waktu panen untuk ukuran yang sama sangat berbeda jauh, sebagai ilustrasi, dalam 1 Ha sawah *Power Thresher* membutuhkan waktu 8 jam, sementara itu teknologi terbaru CH hanya membutuhkan waktu 2-3 jam; (2) Hasil panen dianggap lebih bersih; (3) Lebih praktis karena dapat langsung masukan ke dalam karung.

Namun di sisi lain, inovasi tersebut berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Fakta ini menjadi paradoks tersendiri bagi tenaga kerja pertanian, karena saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Terutama subsector tanaman pangan, subsector ini masih memiliki proporsi paling tinggi berkisar antara 44 – 55 persen dalam menyerap tenaga kerja di sector pertanian. Jumlah tenaga kerja paling tinggi dibandingkan dengan subsector lain mencapai 16.3 juta orang pada 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012 hanya 15.9 juta. Jumlah rumah tangga usaha tani padi yang terserap pada sektor ini sebanyak lebih dari 14 juta, penurunan jumlah rumah tangga usaha tani pun relatif sedikit selama kurun waktu 10 tahun yaitu sebesar 0,41 persen (Sensus Pertanian, 2013). Trend tersebut terjadi dikarenakan bermacam faktor diantaranya bertambah/berkurangnya jumlah lahan (tingkat alih fungsi) dan mobilitas tenaga kerja.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Tahapan panen masih merupakan salah satu tahapan favorit bagi buruh tani. Ketika panen banyak laki – laki, perempuan, muda dan dewasa. Introduksi teknologi pertanian CH menjadi dilema tersendiri. Tahapan panen merupakan tahapan dimana masyarakat tanpa lahan pertanian (*landless peasant*) dapat memperoleh tambahan uang. Tahapan panen juga menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum muda (yang selama ini diidentikan sudah hilang). Pada tahapan panen, upah buruh panen relatif lebih tinggi dibandingkan dengan upah buruh tani pada tahapan pertanian yang lain. Bahkan jika dibandingkan dengan upah di sektor non-pertanian (misal warung). Tahapan panen pun menjadi alternatif kombinasi pendapatan bagi rumahtangga usaha tani maupun rumahtangga bukan usaha tani.

Kondisi ini menjadi paradoks tersendiri bagi pembangunan pertanian dan pedesaan. Di satu sisi mengoptimalkan produksi merupakan hal yang sangat penting, namun di sisi lain

yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan distribusi pendapatan tetap terjadi secara adil terutama bagi masyarakat miskin. Semenjak tahun 2011 pertumbuhan jumlah CH dari tahun ke tahun, terakhir di Desa Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap terdapat 33 unit CH, berbeda dengan di Desa – Desa di Jawa yang hanya berkisar 1 Unit di setiap desanya. Tingginya jumlah unit CH berdampak terhadap banyaknya orang tua yang menjadi buruh panen kemudian berhenti bekerja pada tahapan panen. Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- (1) Bagaimana dampak kemunculan CH terhadap perubahan pola panen dan efisiensi sosial di desa?
- (2) Bagaimana pandangan dan respon buruh panen terhadap kemunculan teknologi CH?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari kemunculan teknologi CH terhadap eksistensi buruh panen baik dari segi sosial dan ekonomi. namun secara lebih detail riset ini bertujuan untuk:

- (1) Menggambarkan dampak kemunculan CH terhadap perubahan pola panen dan efisiensi sosial di desa.
- (2) Menggambarkan pandangan dan respon buruh panen terhadap kemunculan teknologi CH.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini menggunakan kerangka konsep penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap berbagai aspek sosial ekonomi di pedesaan. Terdapat lima konsep utama yang digunakan untuk menguak realitas kemunculan CH di Kabupaten Sidrap, yaitu konsep reproduksi sosial, akses dalam konteks studi agrarian, differensiasi agraris, konsep peralihan nilai, dan konsep efisiensi sosial. Berikut merupakan uraian singkat mengenai kelima konsep yang digunakan,

### *a. Konsep 'akses' dalam konteks studi agraria/pedesaan*

Peluso dan Ribot (2003) mendefinisikan konsep akses sebagai “kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu” (*the ability to benefit from things*). Fokus pada “kemampuan” ini (bukan hanya pada “hak” seperti halnya dengan teori kepemilikan) memungkinkan kita untuk memperhatikan seperangkat hubungan yang lebih luas daripada hanya hubungan kepemilikan. Gagasan Peluso dan Ribot ini mempermudah analisis yang lebih nyata tentang siapa yang sebenarnya menguasai dan menikmati manfaat dari sumber daya, dan tentang dinamika proses yang memungkinkan hal itu terjadi.

### *b. Konsep diferensiasi agraris*

Diferensiasi agraris (*agrarian or rural differentiation*) adalah suatu proses dinamis yang menyangkut munculnya dan atau makin tajamnya perbedaan antargolongan dalam penduduk pedesaan. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut perbedaan pendapatan antargolongan, tetapi lebih mementingkan perubahan dalam hubungan antargolongan (sesama petani maupun antara petani dan bukan-petani) sejalan dengan proses komoditisasi pertanian dan ekonomi pedesaan. Diferensiasi berarti juga suatu proses perubahan dalam mekanisme peralihan

surplus dari mereka yang bekerja di atas tanah, kepada mereka yang mengklaim sebagian dari hasil tanah tersebut, berdasarkan penguasaan mereka atas sumber daya produksi.

### c. *Rejim ketenagakerjaan agraris (agrarian labour regime)*

Konsep rejim ketenagakerjaan agraris adalah alat untuk menggambarkan struktur agraris, dilihat dari perspektif hubungan ketenagakerjaan. Sistem ketenagakerjaan disini memiliki arti luas, yaitu mobilisasi tenaga kerja dan pengorganisasian dalam sistem produksi, dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik. Dengan menyoroti '*methods of mobilizing labour and organizing it in production*', misalnya hubungan ketenagakerjaan intra- dan antar-keluarga, hubungan majikan-buruh, hubungan pemilik-penggarap, dapat dilihat pengaruh hubungan ketenagakerjaan terhadap arus nilai yang beralih antarpihak atas dasar hubungan tersebut.

Bernstein (2010) melihat struktur sosial sistem produksi dan sistem reproduksi dengan mengandalkan konsep diferensiasi agraris serta rejim ketenagakerjaan, secara empiris menfokuskan pada empat pertanyaan pokok, yaitu siapa yang memiliki apa? (penguasaan), siapa yang melakukan apa? dan siapa yang mendapatkan apa? (pola pembagian kerja, rejim ketenagakerjaan dan pola arus peralihan nilai), dan apa yang dilakukan dengan pendapatan tersebut? (pola reproduksi/akumulasi).

### d. *Konsep efisiensi sosial*

Seluruh penggambaran sistem reproduksi sosial pertanian padi akan dianalisis dampaknya terhadap efisiensi sosial. Efisiensi sosial sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini dipilih karena merupakan kondisi dimana distribusi sumber daya di dalam suatu masyarakat mencapai titik yang optimal. Konsep 'efisiensi' disini bukanlah merujuk pada produktivitas tenaga kerja atau keuntungan usaha, tetapi pada sumbangan terhadap pencapaian tujuan pembangunan untuk masyarakat. Dari itu, kita perlu memikirkan sistem pertanian yang paling baik dalam menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja dan seberapa banyak pendapatan yang masuk untuk orang miskin. Hal – hal ini sangat relevan sebagai tujuan analisis kebijakan.

Kriteria yang tepat untuk menilai efisiensi sosial (dan bobot relatif yang kita berikan kepada masing-masing kriteria) juga dapat disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, serta periode tertentu dalam pembangunan. Sebagai contoh, jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini (ketika harga pangan tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan pekerjaan dengan imbalan yang tidak layak, serta masalah lingkungan menjadi serius), kita bisa mengatakan bahwa jenis dan bentuk inovasi yang dinilai paling efisien dari segi sosial dan ekonomi akan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) mendukung peningkatan produksi, (2) memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan menyediakan mata pencaharian, (3) mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, dan (4) mendukung keberlanjutan lingkungan (White, 2013). Sektor pertanian sebenarnya bisa menghidupi banyak orang dengan menyerap tenaga kerja yang tinggi dan membagi keuntungan yang lebih baik kepada lebih banyak orang. Oleh karena itu, analisis efisiensi sosial pada penelitian sektor pertanian padi sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Lokasi, Waktu Penelitian dan Responden Penelitian**

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Sidrap merupakan kabupaten dengan jumlah CH paling besar di Indonesia, menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap, pada tahun 2015 terdapat 311 Unit CH. Selain itu, Kabupaten Sidrap juga dipilih

sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan produksi padi paling tinggi di Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan sejak Februari 2015 sampai dengan September 2015, dengan 30 hari waktu di lapangan.

### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam studi ini mencakup *data sekunder*, yang diambil melalui metode kajian literatur, pengambilan data pada tingkat desa dan data sensus pertanian, dan *data primer* melalui metode pengamatan, transek, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Riset ini menggunakan 3 cara pengumpulan data yang dipakai, yaitu: 1) pengumpulan dokumen/data sekunder 2) pengamatan dan pemetaan, dan 3) wawancara mendalam. Ketiga teknik ini saling melengkapi, dan saling mengkonfirmasi, dilakukan simultan sampai tidak ada lagi informasi baru yang muncul terkait isu dan topik. Berbagai teknik ini dilakukan untuk saling melengkapi informasi, melakukan konfirmasi (verifikasi data), dan triangulasi. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan bisa menjadi suatu data utuh yang valid.

#### **a. Teknik pengumpulan dokumen dan data sekunder**

Teknik pengumpulan dokumen dan data sekunder digunakan untuk menangkap informasi tertulis. Melalui teknik pengumpulan dokumen kita dapat memperoleh informasi terkait penghidupan, sumber daya, infrastruktur, jumlah penduduk, mata pencaharian, kondisi geografis, program bantuan dan gambaran awal kondisi desa dan strata penduduk desa yang dilihat dari mata pencaharian/ pekerjaan.

#### **b. Transek**

Dalam studi ini, transek dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan sumber daya masyarakat dengan menelusuri wilayah desa. Hasil pengamatan kemudian dituangkan ke dalam catatan deskriptif. Transek dilakukan untuk mencari informasi mengenai jumlah dusun dalam desa serta batas-batasnya dan topografinya, gambaran sebaran sawah dan fasilitas pertanian yang ada dan gambaran lokasi rumah tinggal informan berdasarkan strata (*Large Farm, Medium Farm, Small Farm, landless*), pemilik teknologi pertanian dan aktor-aktor lain yang berkaitan dengan penelitian. Gambaran ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menemukan lokasi warga yang akan dijadikan informan. Hal ini secara umum memberikan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian padi (sawah) di desa beserta aktor-aktornya.

#### **c. Wawancara Mendalam**

Hasil wawancara mendalam individu mengandung isu-isu menarik dan informan baru yang juga perlu ditelusuri. Informan merupakan warga desa yang dapat memberikan informasi detail terkait dengan isu teknologi dan kesempatan kerja di Pertanian. Data yang diambil dengan metode ini adalah terkait struktural dalam desa, bagaimana penggunaan teknologi, hambatan dan faktor pendukung penerapan teknologi, dan tantangan produktivitas yang dihadapi dunia pertanian di desa. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk mengecek mengenai kebijakan Pemerintah Nasional/Propinsi/Kabupaten yang mempengaruhi kegiatan pertanian di desa. Peneliti perlu secara bolak balik melakukan triangulasi mengenai kebijakan yang ada dan implementasinya di desa sehingga memahami dampak yang terjadi di desa.

### **3.3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara mencari dan melihat kesamaan pola (benang merah) temuan lapangan dan memperhatikan variasi yang muncul pada pola yang ditemukan. Variasi temuan penelitian pada riset ini dimunculkan dalam bentuk kisah-kisah yang dapat menjadi kontras atau menggambarkan kondisi nyata yang muncul akibat dari kehadiran CH.

### 3.4. Limitasi Penelitian

Limitasi dalam penelitian ini, antara lain:

Terdapat beberapa informasi mengenai tuan tanah yang diperoleh tidak langsung dari pihak tuan tanah, tetapi dari petani – petani yang menggarap sawah milik mereka. Hal tersebut dikarenakan terdapat tuan tanah yang memang tidak bersedia diwawancarai sehingga terdapat informasi tuan tanah yang diperoleh dari “tangan kanan”

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Konteks Desa

Kelurahan Kanyuara terdiri atas 2 lingkungan, lingkungan pertama adalah lingkungan Kanyuara (luas wilayah 900 Ha) dan Lingkungan Pajalele (luas wilayah 571 Ha). Total Penduduk di Kelurahan Kanyuara adalah 3451 jiwa dengan komposisi Laki – laki sebanyak 1.619 Jiwa dan Perempuan sebanyak 1.832 Jiwa. Di Kelurahan Kanyuara terdapat 1044 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas penduduk (90 persen) adalah penganut Kepercayaan Tollentang, karena tidak ada dalam KTP maka penganut kepercayaan ini di masukan ke dalam Agama Hindu, Menurut ibu Satria, masyarakat sendiri mengakui bahwa Tollentang berbeda dengan agama Hindu. Pusat Kepercayaan Tollentang berada di Kecamatan Tellu Limpoe di Desa Anparita. 40 persen petani yang ada di Kelurahan Kanyuara adalah petani penggarap, 35 persen adalah petani pemilik-penggarap, 25 persen merupakan petani pemilik dan 5 persen adalah buruh tani murni (*lih. Tabel 4.1*). Buruh tani untuk tanam dan panen lebih banyak berasal dari luar wilayah seperti Makassar, Takalar, Jeneponto, Bone, Pindrang, dan Pulmas.

**Tabel 4.1 Struktur Agraria Masyarakat Kelurahan Kanyuara berdasarkan Pengelolaan Lahan Lahan**

<b>Struktur Agraria</b>	<b>Persen Masyarakat (%)</b>
Petani Pemilik	25
Petani Pemilik dan Penggarap	35
Petani Penggarap Murni	40
Buruh Tani Murni	5

Sumber: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

### 4.2. Untung-Rugi Kepemilikan *Combine Harvester* secara Ekonomi

Kepemilikan CH sebagai unit usaha (disewakan) mampu memberikan keuntungan dalam jangka pendek ketika belum banyak jumlah CH dalam satu desa, namun tidak demikian dalam jangka waktu yang panjang terutama jika terdapat 34 unit CH di dalam satu desa. Pada awal kemunculannya sekitar tahun 2010, para pemilik CH saat itu mengakui bahwa sangat menguntungkan, bahkan menurut H. Umar (45 tahun) salah satu pemilik awal mengatakan dulu ketika belum banyak saingan CH, dalam satu musim panen mereka bisa membeli lagi satu unit CH seharga 200 juta. Namun sekarang, hal tersebut sangat sulit terjadi bahkan para pemilik CH sekarang harus memperluas wilayah kerja mereka sampai ke Kabupaten – Kabupaten lain.

Para pemilik CH sejak dua tahun terakhir harus melakukan ekspansi usaha penyewaan. Hal ini disebabkan persaingan CH di Kelurahan Kanyuara semakin tinggi. Pada awal mulanya tuan – tuan tanah membeli CH hanya untuk memanen di sawah mereka sendiri sehingga mereka tidak perlu bergantung kepada pemilik – pemilik power thresher. Para tuan tanah mengakui bahwa dulu sebelum masuknya CH, proses panen sangat lama dan mereka juga harus bersabar menunggu giliran sawah mereka di panen, sementara itu sawah yang mereka miliki lebih dari 5 Ha. Lamanya menunggu proses panen dipandang oleh para tuan tanah akan menurunkan kualitas gabah yang dipanen sehingga harga akan semakin murah. Berangkat

dari rasionalitas tersebut maka para tuan tanah mulai membeli CH agar dapat memanen sawah mereka sendiri. Namun, pada akhirnya CH milik tuan tanah tersebut tidak hanya memanen sawah mereka, mereka juga menyewakan CH kepada petani – petani lain yang menginginkan sawahnya dipanen secara cepat. Pemilik CH mengakui bahwa pada awal kemunculannya CH sangat menguntungkan, tetapi seiring dengan semakin bertambahnya jumlah CH dari tahun – ketahun membuat keuntungan yang diperoleh pemilik CH menjadi menurun. Bahkan menurut penuturan Sunarsi (50), usaha penyewaan CH sudah menurun keuntungannya penurunannya sekitar 75 persen jika dibandingkan dengan pemilik. Fakta ini menjadi permasalahan besar, karena harga CH terbilang mahal, satu unitnya dapat mencapai harga 400 juta. Semakin turunnya keuntungan akan berdampak terhadap periode *Break Event Point* (BEP)/titik impas yang akan semakin mundur, dan relatif sulit untuk mencapai titik impas pada waktu yang dekat.

CH pada umumnya lebih banyak beroperasi pada masa panen di musim kemarau, hal ini dikarenakan kondisi lahan pada musim kemarau relatif lebih “ramah” bagi CH, sedangkan jika lahan basah maka CH akan sulit beroperasi. Pemilik CH mengakui bahwa ketika hujan (terutama hujan besar) sulit untuk mengoperasikan CH karena permukaan tanah di sawah menjadi lunak sehingga resiko CH untuk terjebak ke dalam lumpur bahkan menjadi besar. Selain itu, musim hujan terkadang membuat padi rebah/rubuh sehingga dalam proses pemocongannya harus menggunakan metoda pemocongan manual

CH tidak bisa dengan bebas menentukan semua sawah akan, terdapat beberapa kriteria sawah yang dapat di panen dengan menggunakan alat panen CH. Kriteria *Pertama* adalah sawah yang dipanen bukam merupakan sawah langganan milik pengusaha CH yang lain. *Kedua*, karakter tanah dan kemiringan tanah yang tidak terlalu miring. *Ketiga*, akses sawah dekat dengan jalan usaha tani sehingga memudahkan truk pengangkut CH untuk mendekati sawah. *Keempat*, padi tidak dalam kondisi rebah/rubuh karena jika padi rebah maka proses pemanenan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. *Kelima*, luasan sawah yang dipanen harus lebih besar dari 0.5 Ha, apabila lahan sawah lebih kecil dari luasan tersebut maka CH tidak mau memanen sawah tersebut, terkecuali ada sawah lain yang akan dipanen di sekitar sawah kecil tersebut.

#### **4.2.1. Persaingan yang Semakin Banyak Membuat Combine Harvester Tidak Menguntungkan Untuk jangka Panjang, kecuali mampu memonopoli Luas Wilayah Panen.**

Keuntungan bersih dalam jangka panjang menjadi sulit untuk tercapai karena persaingan CH sangat ketat dan mengingat harga beli CH yang relatif tinggi. Harga beli CH pada desa penelitian berkisar antara 220 juta-500 juta bergantung pada kualitas yang digunakan, harga beli tersebut belum termasuk biaya pembuatan bangunan penyimpanan (paling minim 20 juta) dan biaya pembelian truk untuk mengangkut CH. Harga CH paling murah yaitu 220 juta. Namun, temuan di lapangan CH dengan harga yang murah kurang diminati oleh petani. Menurut salah satu pemilik CH, pada saat ini petani juga sudah memilih-milih dalam menggunakan alat panen tersebut, petani lebih tertarik menggunakan *combine* dengan merek tertentu dengan harga jual yang lebih mahal, dengan alasan lebih cepat dibandingkan merek lain, petani bahkan tidak mau menggunakan merek tertentu (harga CH ini relatif lebih murah dibandingkan dengan merek lainnya) dikarenakan CH tersebut sering rusak dan sering terhambat pekerjaan panen milik petani. Ketatnya persaingan, menyebabkan pemilik CH harus menentukan harga sewa lebih murah karena untuk menutupi biaya cicilan (akibat harga yang mahal untuk pengembalian modal) agar lebih banyak petani yang sawahnya mau dipanen dengan CH miliknya.

Jika dibandingkan dengan dengan harga beli, dan biaya modal lainnya seperti pembuatan bangunan penyimpanan, pembelian truk pengangkut dan lain-lain. Maka sebenarnya pemilik CH akan mengalami kerugian jika terdapat banyak persaingan kepemilikan *combine*, namun

jika persaingan masih sedikit maka kepemilikan CH akan mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi dikarenakan pendapatan CH sangat bergantung dengan luasan lahan panen. Luasan lahan di Kelurahan Kanyuara relatif tetap sementara itu jumlah CH terus bertambah, data terakhir di dalam kelurahan tersebut terdapat sekitar 35 Unit CH (Sebagai perbandingan, di Jawa belum tentu satu Kecamatan memiliki satu unit CH). Rasionalitas utama CH bukan sebagai unit usaha tetapi lebih menjadi sarana produksi penunjang kegiatan pertanian. Bahkan bagi tuan tanah, kepemilikan CH tidak semata – mata untuk mempercepat waktu panen atau untuk unit usaha, CH dilihat sebagai instrumen untuk bisa memperluas ekspansi pabrik penggilingan beras mereka. Pada umumnya jasa penyewaan panen dengan menggunakan CH sudah satu paket dengan pengangkutan beras ke penggilingan. Petani yang menggunakan jasa CH dari tuan tanah “A” harus menjual berasnya kepada penggilingan tuan tanah “A”. Keuntungan jangka panjang adalah sebagai “alat sedot” karena bisa menjadi penguat unit usaha lain seperti penggilingan, penebas dan tengkulak. Pada salah satu kasus di Desa Sulawesi Selatan terdapat pemilik CH yang tidak punya penggilingan mengeluh “*bisa-bisa combine harvester hanya digunakan oleh para tuan – tuan tanah pemilik penggilingan*”.

#### **4.3 Kemunculan Inovasi yang Menyebabkan Ketimpangan Pendapatan Desa dan Monopoli Rantai Pemasaran Beras**

Mayoritas pemilik CH secara pribadi memiliki lahan sawah mencapai lebih dari 10 – 80 Ha bahkan terdapat petani yang memiliki lahan sawah mencapai 300 ha, meskipun begitu terdapat variasi kepemilikan lahan hanya 2 ha, pada umumnya pemilik CH yang luasan sawah kisaran 2 Ha mereka juga mantan pengusaha yang memiliki alat perontok padi, mereka berusaha sedemikian rupa dapat membeli CH untuk tetap menjaga petani yang sudah menjadi langganan mereka tetap setia menjual hasil panennya.

Sebagai contoh, pemilik sawah secara pribadi di Kabupaten Sidrap adalah petani kaya yang memiliki sawah seluas 30-50 Ha dan keluarga (ibunya) memiliki sawah sampai 300 Ha di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Selain itu, Pemilik CH tersebut memiliki penggilingan padi dengan kapasitas produksi menghasilkan 15 Ton beras/hari dan memiliki 6 unit CH. Wilayah kerja CH yang dimilikinya meliputi Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan. Ada juga petani kaya lainnya yang memiliki CH mencapai 12 buah dan memiliki sawah lebih dari 300 Ha.

*“CH telah menggantikan banyak tenaga kerja manual, namun tidak ada yang melakukan protes karena yang memiliki CH adalah orang besar dan memiliki banyak lahan luas, sehingga para petani penggarap pun tidak bisa memprotes” -Pak Farid (50) mantan buruh panen-*

Penggunaan CH baik secara pribadi maupun bantuan pun berdampak langsung terhadap buruh panen dan pada akhirnya berdampak pada distribusi pendapatan di desa, dikarenakan adanya pengurangan tenaga kerja buruh panen. Jika sebelumnya tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 20-50 orang/ha namun kini hanya 5-8 orang/3-4 ha. Perubahan teknologi panen ini berdampak terhadap aliran nilai uang (*income*) dari awalnya jatuh kepada buruh panen menjadi bergeser kepada pemilik CH dan operatornya yang hanya berjumlah 5 – 8 Orang. Fenomena ini membuat para pemilik CH menjadi semakin kaya (hanya golongan tertentu) dan para buruh panen kehilangan pekerjaannya. Pada kasus ini introduksi inovasi teknologi justru memunculkan ketimpangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin dipedesaan.

#### **4.4 Melihat Teknologi CH dari Sudut Pandang Efisiensi Sosial.**

Pada penelitian ini efisiensi sosial mencoba membedah CH dari beberapa sudut pandang antara lain: (1) apakah kemunculan CH dapat mendukung peningkatan produksi? (2) apakah CH dapat memaksimalkan tenaga kerja dan menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat



desa? (3) apakah CH mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik? dan (4) Apakah CH mendukung keberlanjutan lingkungan?

Sektor pertanian idealnya bisa menghidupi banyak orang dengan menyerap tenaga kerja dan memberikan keuntungan lebih banyak kepada banyak orang. Namun, pada realitasnya keberadaan CH hanya menguntungkan sebagian orang saja yang bahkan secara ekonomi cenderung orang kaya.

**Tabel 4.1. Aktor yang diuntungkan dan Aktor yang dirugikan akibat introduksi CH**

<b>Aktor teruntungkan</b>	<b>Aktor terugikan</b>
1. Pemilik <i>combine harvester</i>	1. Pemilik <i>thresher</i>
2. Pengguna <i>combine harvester</i> (lahan besar)	2. Pengguna <i>combine harvester</i> (lahan kecil)
3. Calo/peluncur	3. Petani yang bekerja sebagai buruh tani bawon
4. Buruh <i>combine harvester</i>	4. Buruh tani tidak bertanah
	5. Pengeprik
	6. Petani itik/sapi
	7. Pedagang pasar malam/ekonomi rakyat

### **Hilangnya kesempatan kerja panen bagi buruh panen terutama buruh panen perempuan**

Seluruh tenaga kerja (operator) CH berjenis kelamin laki – laki, mereka yang bekerja juga bukan orang – orang sembarang. Orang yang bekerja sebagai operator maupun asisten operator merupakan orang kepercayaan atau masih memiliki saudara dengan tuan tanah, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi resiko kerusakan alat. Masuknya CH ke Kelurahan Kanyuara menjadi ancaman bagi para buruh pesangkih (panen) terutama perempuan karena mereka menjadi kehilangan pekerjaannya dan hanya menggagur berbeda dengan laki – laki yang “relatif” memiliki alternatif pelarian sebagai pembawa becak motor (bentor).

### **Keputusan panen petani dengan lahan kecil (< 0.5 Ha) sangat tergantung Petani Lahan Luas.**

Petani dengan luasan lahan kecil menjadi tidak memiliki kekuatan untuk dapat menentukan masa tanam karena mau tidak mau mereka harus menanam berbarengan dengan petani lahan luas. Jika para petani dengan luasan lahan menanam pada waktu yang berbeda maka mereka khawatir nanti ketika panen pemilik CH tidak mau memanen sawah milik mereka karena biaya operasionalnya terlalu besar, namun berbeda jika mereka menanam bersamaan dengan petani lahan besar maka nanti ketika panen pemilik CH bersedia untuk memanen lahan mereka karena posisinya dekat dengan sawah dengan ukuran besar (sekalian). Hal ini sangat penting bagi petani lahan kecil karena mereka tidak memiliki alternatif alat panen selain CH, alat panen terdahulu seperti power thresher sudah hilang.

### **Punahnya buruh pemungut hasil sisa – sisa panen.**

Sebelum kemunculan CH, kegiatan mengambil/mengumpulkan ceceran sisa panen padi masih cukup banyak dilakukan di masing-masing desa penelitian. Mayoritas para “pemungut sisa gabah” adalah ibu-ibu tua yang memiliki keterbatasan tenaga untuk bisa terlibat langsung dalam proses panen. Mereka biasanya merupakan rumah tangga petani miskin. Gabah sisa panen dikumpulkan dari berbagai lokasi panen di desa untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga dan mengurangi kerentanan hidup.

Pada saat panen manual atau menggunakan *power thresher*, seorang “pemungut sisa gabah” *ngasak* dapat mengumpulkan sisa panen sebanyak 1-5 karung dalam 1 musim panen. Sementara sekarang mereka tidak dapat lagi mencari sisa panen pada lahan yang dipanen

menggunakan CH karena ceceran gabah langsung berserakan di tanah dan tidak bisa dipulung.

#### **Mengancam ketersediaan pakan alternatif ternak bebek**

Penggunaan CH juga mengancam ketersediaan pangan bagi bebek. Banyak peternak bebek pada desa penelitian di Sulawesi Selatan yang sudah tidak mampu beternak bebek karena sudah tidak bisa mengembalakan bebek pada paska panen. Sisa gabah dari panen manual atau menggunakan *power thresher* dimanfaatkan oleh peternak sebagai sumber pakan untuk bebek-bebek. Harga pakan bebek terus meningkat sedangkan sumber pakan lain yang berasal dari sisa gabah sudah sangat berkurang. Oleh karena itu banyak peternak bebek yang gulung tikar karena harus menanggung biaya pakan yang jauh lebih besar.

#### **Mematikan pasar rakyat (Pasar Malam)**

Pada saat panen manual dan menggunakan *power thresher* masih banyak dilakukan pada desa-desa di Sulawesi Selatan, perekonomian rakyat tumbuh di desa. Panen dilakukan hingga malam hari. Desa menjadi ramai oleh aktivitas panen. Banyak muncul pasar malam yang menjual beraneka ragam barang. Perputaran uang di desa ramainya orang-orang menjadi potensi bagi tumbuh dan Bergeraknya sektor perdagangan di desa. Setelah banyak CH masuk ke desa, panen dilakukan lebih cepat dari sebelumnya sehingga para buruh – buruh panen yang berdatangan dari Kabupaten lain tidak ada lagi. Masyarakat Kelurahan yang suka berdagang kue atau makanan nasi menjadi tidak memiliki pekerjaan lain dan desa tidak seramai dulu lagi.

#### **4.5 Potensi Konflik akibat Hadirnya *Combine Harvester***

Kemunculan CH memiliki potensi untuk memicu timbulnya konflik bukan hanya antara buruh tani dengan pemilik combine harvester tetapi juga antar pemilik combine harvester. Konflik lebih banyak terjadi diantara pemilik *combine harvester*. Tingginya persaingan diantara mereka menjadi pemicunya. Pada awal kemunculan CH, harga sewa CH adalah 9:1 (Dari 9 karung yang dipanen, ongkosnya 1 karung) sementara itu sekarang harga sewanya semakin turun menjadi 12:1. Saat ini, persaingan harga sewa sudah mulai tidak sehat. Terdapat pemilik CH yang berasal dari Sambi yang jahil dengan memberikan harga lebih murah. Harga sewa yang dipatok mencapai 15:1 hingga 16:1. Selain itu terkadang pemilik dari luar sering memberikan tips berupa uang tambahan sebesar 200-300 ribu diberikan kepada petani penggarap yang bersedia menggunakan CH milik orang luar tersebut.

Pemberian harga murah dari pemilik *combine harvester* dari luar desa telah merusak harga dan tidak sesuai dengan standar. Hal ini menyebabkan pemerintah desa dituntut untuk turut menentukan harga dan memberikan hukuman bagi pemilik CH yang tidak sesuai dengan standar. “*Jika memang terus terjadi persaingan tidak sehat antar pemilik combine harvester maka ditakutkan nanti akan terjadi baku-parang dan akan ada pembakaran combine harvester dari luar.*”

#### **Perlawanan yang tidak pernah terjadi**

Para buruh panen tidak melakukan protes karena sebagian buruh panen di dalam Kanyuara merupakan petani penggarap. Mereka mengakui dengan CH sangat menguntungkan karena waktu cepat, tidak terjadi keterlambatan, dan padi yang diperoleh lebih banyak di bandingkan dengan PT. Tidak banyak banyak yang hilang. Para pemuda yang kemudian tersisih dari pekerjaan sebagai buruh panen memilih untuk bekerja sebagai pengemudi taksi (Pengangkut Gabah), pengemudi Becak Motor, terdapat juga pemuda yang kemudian bekerja sebagai operator Combine Harvester. Sementara itu bagi buruh perempuan dan orangtua, mereka hanya mengeluh tetapi di dalam rumah saja, tidak sampai keluar rumah karena mereka sudah pasrah. Buruh panen tersebut menganggap itu hak orang kaya untuk membeli Combine karena mereka memiliki uang.

Para buruh panen tidak dapat begitu saja memprotes atau melakukan perlawanan terhadap pemilik CH. Mereka sangat menyadari resiko yang akan kemungkinan muncul jika mereka melakukan perlawanan terhadap pemilik CH. Mayoritas pemilik CH di Kelurahan Kanyuara adalah orang – orang yang memiliki kekuatan di rantai produksi pertanian (tuan tanah, ketua gapoktan, pemilik pabrik penggilingan). Para buruh panen di Kelurahan Kanyuara juga bekerja sebagai petani pengelola sawah milik para tuan tanah tersebut, jika mereka melawan pengelolaan tanah bisa sewaktu – waktu bergeser kepada orang lain sehingga mereka kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani. Bagi mereka yang merupakan petani pemilik lahan sendiri dan menjadi buruh panen, mereka jika mereka melakukan perlawanan mereka khawatir akan kesulitan ketika menjual hasil panennya karena pemilik CH adalah pemilik pabrik penggilingan beras.

Pada awal kemunculannya sempat terjadi perlawanan namun sifatnya tidak terbuka, ada petani yang juga merupakan pengusaha pemilik alat panen *power thresher* dengan sengaja membuang kelapa sawah dengan tujuan agar pisau mesin CH rusak, pada awalnya strategi tersebut berhasil karena CH merek tertentu (merek murah) dapat rusak dan biaya penggantian pisau sangat mahal. Namun, berjalannya waktu para pemilik CH mengetahui perlawanan tersebut dan memodifikasi CH dan membeli CH dengan merek terbaru yang lebih kuat. Para tuan tanah pemilik CH memiliki strategi tersendiri agar dapat meminimalisir perlawanan dari buruh panen, mereka menggunakan orang – orang local yang memiliki status seperti tokoh masyarakat atau tokoh pemuda untuk menjadi penghubung (semacam calo) antara pemilik CH dengan petani. Hal ini terlihat sangat efektif karena para tokoh masyarakat tersebut mampu “menginstall imajinasi para buruh panen” agar tidak melakukan perlawanan. Di Sulawesi Selatan perlawanan Buruh Panen tidak begitu terjadi karena memang tradisi panen di Sulawesi Selatan berbeda dengan tradisi di Jawa dimana para buruh panen masih memiliki ikatan dalam bentuk *ceblokan*, *kedokan* ataupun *bawon*. Di Sulawesi Selatan sistem pembayaran buruh tanam dan panen sudah menggunakan upah harian sehingga mereka tidak memiliki hak untuk panen dll.

### Kesimpulan dan Saran

1. Kepemilikan *combine harvester* sebagai unit usaha sewa memberikan keuntungan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang merugikan, jika banyak persaingan kecuali memonopoli areal luas lahan yang dipanen.
2. Kepemilikan *combine harvester* memperkuat ketimpangan pendapatan dan monopoli rantai pemasaran beras. Pada umumnya kepemilikan *combine harvester* secara pribadi maupun bantuan di desa-desa penelitian dimiliki oleh orang kaya yang ada di dalam desa. Mereka rata-rata adalah pemilik lahan sawah yang luas dan sekaligus pelaku usaha dalam rantai hulu-hilir beras seperti tengkulak, pemilik penggilingan padi, dan penebas.
3. Lebih banyak aktor yang terugikan akibat penggunaan *combine harvester*, dan banyak diantaranya tergolong miskin. Proporsi jumlah yang teruntungkan adalah pemilik *combine harvester*, pengguna *combine harvester* (lahan besar), *calo/peluncur* dan *buruh combine harvester*, sedangkan pihak yang terugikan adalah pemilik *thresher*, pengguna *combine harvester* (lahan kecil), petani yang bekerja sebagai buruh tani *bawon*, buruh tani tidak bertanah, pengeprik, petani itik/sapi dan pasar malam/ekonomi rakyat.
4. Mereka yang kehilangan mata pencaharian dari kemunculan *combine harvester* sulit untuk mengakses pekerjaan lain diluar pertanian padi yang menawarkan *income* yang relatif sama dan atau lebih baik bahkan mengganggu.
5. *Combine harvester* memicu timbulnya konflik pada beberapa desa penelitian bukan hanya antara buruh tani dengan pemilik *combine harvester* tetapi juga antar pemilik *combine harvester*, pemilik *combine harvester* dengan pemerintah desa bahkan antar petani.

6. Perlawanan buruh panen menjadi tidak begitu muncul karena para pemik CH menguasai seluruh rantai hulu – hilir pertanian sehingga perlawanan menjadi mustahil kecuali para buruh panen berani menghadapi resiko.

## 5.2 Saran dan Rekomendasi

1. Penggunaan anggaran untuk pengadaan *combine harvester* sebaiknya dihentikan dan dialihkan ke pengembangan pada teknologi dan teknik pertanian inovatif yang lebih melibatkan petani.
2. Organisasi petani pada daerah-daerah dengan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, dapat bersepakat untuk memiliki *combine harvester* dengan institusi pengelolaan yang dikelola kelompok buruh tani. Membatasi pemilikan *combine harvester* oleh pribadi digantikan dengan *combine harvester* yang dikelola kelompok buruh tani.
3. Menerapkan kebijakan disinsentif bagi pemilik *combine harvester* di area area yang berdampak negatif. Disinsentif perlu diberikan sebagai kompensasi atas hilangnya mata pencaharian tenaga kerja panen. Selain itu, diinsentif diperlukan untuk mencegah persebaran *combine* kepemilikan

## Daftar Pustaka

- Aggarwal, Partap C. and Madhu S. Mishra. 1973. The Combine Harvester and Its Impact on Labour: A Study in Ludhiana. *Indian Journal of Industrial Relations*, Vol. 9, No. 2 (Oct., 1973), pp. 293-308.
- Akatiga. 2015. *Combine Harvester: Teknologi Tidak Tepat Guna*. Akatiga Pusat Analisis Sosial: Bandung.
- BPS. 2013. *Sensus Pertanian 2013: Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara)*. Jakarta:BPS.
- Jayasuriya, S. K., and R. T. SHAND. 1986. Technical Change and Labor Absorption in Asian Agriculture: Some Emerging Trends. *World Development*, Vol. 14, No. 3, pp. 415-428.

- Kementerian Pertanian. 2013. *Statistik Ketenagakerjaan sektor pertanian tahun 2013*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian.
- Lingard, John & Al Sri Bagyo. 1983. The Impact of Agricultural Mechanisation on Production and Employment in Rice Areas of West Java. BIES Vol 19 No 1, April 1983.
- Nugraha, YA dan Herawati R. 2014. Menguak Realitas Orang Muda Sektor Pertanian di Perdesaan. *Jurnal Analisis Sosial* Vol 19 No 1. Akatiga: Bandung
- Rofi'ah dan Nugraha YA. 2016. Hilangnya Kesadaran Palsu: Sakralisasi Mesjid sebagai Simbol Pergerakan Roda Ekonomi Masyarakat Miskin di Pedesaan (Studi Kasus Masyarakat Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak Kec. Tanah Sareal). *Jurnal Wahana* Vol 1 No 12. Universitas Pakuan: Bogor
- Scott, C James. 1985. *Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Sinaga, S Rudolf. 1978. Implications of Agricultural Mechanisation for Employment and Income Distribution: A Case Study from Indramayu, West Java. BIES Vol 14 No 2, July 1978
- Stiglitz, E Joseph. 1976. The Efficiency Wage Hypothesis, Surplus Labour, and the Distribution of Income in L.D.C.s. *Oxford Economic Papers*, New Series, Vol. 28, No. 2 (Jul., 1976), pp. 185-207.
- Valdiani D, Nugraha YA dan, MRA Siregar. 2017. Attendance of Mass Media and Parents in Defining The Value of Agriculture in The Eyes of Rural (Case Study of Rural Youth at Horticulture Center in Cianjur Regency). *Journal of Humanities and Social Studies* Vol 1 no 1. Universitas Pakuan Bogor.
- Wati, Herlina dan Charina Chazali. 2014. Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial. *Laporan Studi Ketahanan Pangan*. Bandung: Akatiga